

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi politik luar negeri feminis Swedia tahun 2014-2017. Isu mengenai feminisme telah berkembang sejak akhir abad ke-18 yang lalu. Namun kenyataannya, pada saat ini isu ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi. Berdasarkan data dari Bank Dunia, sampai saat ini representasi perempuan dalam parlemen nasional masih sangat rendah, yaitu disekitaran angka 20%. Ini merupakan angka yang cukup rendah. Padahal, peran perempuan dalam pembuatan keputusan sangatlah penting, karena dalam keputusan yang dibuat, ada pula kepentingan perempuan. Sehingga apabila perempuan tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan, akan berakibat pada tidak dimasukkannya pendapat perempuan dalam hasil keputusan yang dibuat. Swedia sebagai salah satu negara yang cukup sukses dalam hal kesetaraan gender, yang terbukti dengan jumlah representasi perempuan dalam parlemennya sejak 1994 selalu diatas 40% dan sekarang mencapai angka 44%. Dengan representasi perempuan yang cukup seimbang dengan laki-laki, menghasilkan berbagai kebijakan yang ramah perempuan. Sehingga menciptakan kondisi yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Keberhasilan Swedia dalam ranah domestic ini, dianggap Swedia perlu di terapkan diseluruh dunia agar pedamaian global dapat tercapai. Untuk itu, pada Oktober 2014, Kementerian Luar Negeri Swedia meluncurkan politik luar negeri feminis untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Dalam menyebarkan ideologi feminisme tersebut, Swedia menggunakan *soft power* nya, karena dirasa lebih efektif dalam mencapai tujuan dari politik luar negeri. Swedia mendukung peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di Somalia dan Moldova, dan juga mendukung badan-badan UE dan PBB dalam mencapai kesetaraan gender. Selain itu Swedia juga menerapkan gender marker dalam memberikan bantuan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metodeoogi kualitatif yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan website.

Kata Kunci : Politik Luar Negeri, Feminisme, Soft Power

ABSTRACT

This article aims to explain the implementations of Swedish feminist foreign policy between 2014-2017. The issue of feminism has evolved since the end of the 18th century. But in reality, at the present the issue of gender inequality against women still occurs. Based on data from the World Bank, until now the representation of women in the national parliament is still very low, specifically around 20%. This is a low number. In fact, the role of women in decision making is very important, because in the decision-making, there are also women's interests. So that if women are not involved in decision making process, it will produce the exclusion of women's opinions in the results of decision making. Sweden as a country which is successful in terms of gender equality, as evidenced by the number of women's representation in its parliament since 1994 is always above 40% and now reaches 44%, with the representation of women who are fairly balanced with men, it produces various women-friendly policies. So, it creates a peaceful and prosperous condition for its society. Because of its success in domestic area, Sweden considers the needs of gender equality to be applied throughout the world so that global peace can be achieved. For this reason, in October 2014, the Swedish Foreign Ministry launched a feminist foreign policy for the first time in history. In spreading the ideology of feminism, Sweden uses its soft power, because Sweden believes that it is more effective to achieve the goals of its foreign policy. Sweden supports the increasing number of women participation in politics in Somalia dan Moldova, as well as supports EU dan UN bodies in achieving gender equality and implements gender marker in foreign aid. This study uses qualitative methodology derived from books, journals, articles and websites.

Keywords : Foreign Policy, Feminism, Soft Power